BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan penelitian, maka peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Perumusan masalah kebijakan pada analisis kebijakan kartu tanda penduduk (KTP) *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta telah berjalan dengan baik. Perumusan masalah kebijakan terdiri dari: (1) Analisis Batas dengan memperkirakan masalah individu pada aparatur pemerintahan dan masyarakat setelah pengambilan keputusan pada perumusan masalah kebijakan. (2) Analisis Klasifikasi dengan mempertimbangkan beberapa kondisi ketika berjalannya proses pembuatan KTP *Online*. (3) Analisis Hirarki dengan mencari penyebab adanya kendala pada KTP *Online.* (4) *Synecties* dengan mengenali masalah-masalah pada kebijakan KTP *Online*. (5) *Brainstorming* dengan menghasilkan ide-ide yang membantu pelaksanaan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta. (6) Analisis Perspektif dengan mencari pandangan tentang KTP *Online* dari masyarakat dan aparatur pemerintahan Kabuoaten Purwakarta. (7) Analisis Asumsi dengan mencari pendapat dan pemahaman masyarakat terhadap KTP *Online*. (8) Pemetaan Argumentasi dengan menggabungkan pendapat-pendapat terkait kebijakan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta.

2. Peramalan Kebijakan pada analisis kebijakan kartu tanda penduduk (KTP) *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta telah berjalan dengan baik. Peramalan Kebijakan yang terdiri dari: (1) Proyeksi dengan memperhatikan masalah masa lalu tentang pembuatan KTP yang masih manual. (2) Prediksi dengan menggambarkan kebijakan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta di masa depan secara teori. (3) Perkiraan dengan memperkirakan masalah kebijakan KTP *Online* di masa depan.
3. Rekomendasi pada analisis kebijakan kartu tanda penduduk (KTP) *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta telah berjalan dengan baik. Rekomendasi terdiri dari: (1) Pengambilan Keputusan dengan diambil keputusan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta. (2) Kepastian dengan kepastian adanya sarana dan prasarana penunjang KTP *Online*. (3) Kecepatan dengan sikap pemerintah dalam mengatasi masalah pada gangguan KTP *Online* Kabupaten Purwakarta seperti gangguan jaringan.
4. Pemantauan kebijakan pada analisis kebijakan kartu tanda penduduk (KTP) *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta telah berjalan dengan baik. Pemantauan Kebijakanyang terdiri dari : (1) Kepatuhan Sikap dengan mengetahui kepatuhan masyarakat dan aparatur pemerintahan Kabupaten Purwakarta terhadap Peratudan Daerah Kabupaten Purwakarta. (2) Pemeriksaan Kegiatan dengan menetukan sumber daya dan pelayanan KTP *Online* sebagai kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. (3) Akuntansi dengan mencari informasi berdasarkan hitungan yang jelas

dengan perubahan pada masyarakat sebelum dan setelah adanya kebijakan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta. (4) *Eksplanasi* dengan menjelaskan hasil dari kebijakan KTP *Online* dengan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

5. Penilaian kebijakan pada analisis kebijakan kartu tanda penduduk (KTP) *Online* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta telah berjalan dengan baik. Penilaian kebijakan yang terdiri dari: (1) Evaluasi Semu dengan mencari informasi yang *valid* terkait KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta. (2) Evaluasi *Formal* dengan melihat kondisi di lapangan secara lansung pada pelaksanaan pembuatan KTP *Online* di Kabupaten Purwakarta.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Perumusan masalah yang harus memperhatikan pada bidang software, hardware dan jaringan agar kualitas di tingkatkan supaya KTP *Online* berjalan dengan lebih optimal.
2. Peramalan Kebijakan lebih ditingkatkan agar KTP *Online* dapat efektif, dan tercapainya tujuan yang ditetapkan
3. Rekomendasi kebijakan perlunya memeprhatikan untuk menghemat biaya dalam sebuah kebijakan.

4. Pemantauan kebijakan KTP *Online* untuk lebih dalam pemahaman yang dapat diambil dalam pemahaman sebelumnya agar bisa berjalan dengan baik.
5. Penialaian kebijakan dalam pembuatan KTP *Online* agar bisa menjadi suatu harapan untuk masyarakat untuk lebih berkesinambungan dan kebijakannya ditingkatkan kembali.